

**EVALUASI EFEKTIVITAS DANANTARA DALAM MENDUKUNG  
PEMERATAAN EKONOMI DAN REFORMASI PEREKONOMIAN  
NASIONAL**

***EVALUATION OF DANANTARA'S EFFECTIVENESS IN SUPPORTING  
ECONOMIC EQUITY AND NATIONAL ECONOMIC REFORM***

**Yudha Aditya Pradana dan Wilma Silalahi**

Korespondensi Penulis : [yudhalawyer28@gmail.com](mailto:yudhalawyer28@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Pradana, Yudha Aditya dan Wilma Silalahi. *Evaluasi Efektivitas Danantara dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Perekonomian Nasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

**ABSTRAK**

Studi ini mengevaluasi efektivitas Danantara, Dana Kekayaan Negara Indonesia, dalam mendorong pemerataan ekonomi dan mendukung reformasi ekonomi nasional. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Danantara dirancang sebagai lembaga investasi strategis yang bertugas mengoptimalkan aset negara melalui kerangka investasi administratif hukum. Terinspirasi dari model internasional seperti Temasek Holdings dan Khazanah Nasional, Danantara mengadopsi mandat yang lebih luas dengan mengonsolidasikan aset negara dan meningkatkan sinergi antarlembaga. Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh metode perundang-undangan, konseptual, dan berbasis kasus, penelitian ini mengungkapkan bahwa Danantara memainkan peran penting dalam memperluas akses ke sumber daya ekonomi khususnya bagi UMKM dan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan aset negara. Digitalisasi aset telah mengubahnya menjadi instrumen aktif pertumbuhan ekonomi, berkontribusi langsung pada penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah, dan peningkatan daya saing di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan logistik. Meskipun telah mencapai berbagai pencapaian ini, tantangan masih ada dalam hal harmonisasi regulasi, koordinasi kelembagaan, dan infrastruktur digital terutama di wilayah-wilayah yang belum berkembang. Keberhasilan Danantara bergantung pada pengawasan hukum yang kuat, kebijakan yang adaptif, manajemen yang profesional, dan pemantauan yang berkelanjutan. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Danantara telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif, dukungan regulasi yang berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memaksimalkan potensi transformatifnya dalam lanskap ekonomi Indonesia yang terus berkembang.

**Kata Kunci: Efektivitas Danantara, Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Ekonomi Nasional**

**ABSTRACT**

This study evaluates the effectiveness of Danantara, Indonesia's Sovereign Wealth Fund, in promoting economic equity and supporting national economic reform. Established under Law No. 1 of 2025, Danantara is designed as a strategic investment institution tasked with optimizing state assets through a legal administrative investment framework. Drawing inspiration from international models such as Temasek Holdings and Khazanah Nasional, Danantara adopts a broader mandate by consolidating state assets and enhancing inter-agency synergy. Through a normative juridical approach supported by statute, conceptual, and case-based methods, this research reveals that Danantara plays a significant role in broadening access to economic resources particularly for MSMEs and improving the transparency, efficiency, and sustainability of state asset management. The digitalization of assets has transformed them into active instruments of economic growth, contributing directly to job creation, regional development, and improved competitiveness in strategic sectors such as infrastructure, energy, and logistics. Despite these achievements, challenges persist in regulatory harmonization, institutional coordination, and digital infrastructure especially in underdeveloped regions. The success of Danantara relies on strong legal oversight, adaptive policies, professional management, and continuous monitoring. The study concludes that while Danantara has demonstrated promising results in fostering inclusive growth, sustained regulatory support and cross-sector collaboration are essential to maximize its transformative potential in Indonesia's evolving economic landscape.

**Keywords:** *Danantara Effectiveness, Economic Equity and National Economic Reform*

**A. PENDAHULUAN**

Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia menandai era baru dalam tata kelola investasi strategis nasional. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, entitas ini diharapkan mampu mengoptimalkan aset negara melalui skema investasi yang lebih terarah dan berbasis hukum yang kuat. Menurut Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Dosen Ilmu Hukum dan Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, pembentukan Danantara merupakan implementasi nyata dari prinsip Pasal 33 UUD NRI 1945, yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam perekonomian guna menyejahterakan rakyat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, *DANANTARA: Reformasi Investasi Strategis dalam Hukum dan Ekonomi*, diakses dari <https://syariah.uinsaid.ac.id/danantara-reformasi-investasi-strategis-dalam-hukum-dan-ekonomi/>, diakses pada 16 April 2025.

Dalam ekosistem holding BUMN keuangan, Danantara berperan strategis sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi modal serta mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor-sektor prioritas.<sup>2</sup> Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi negara, Danantara diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-BUMN dan menarik investasi asing guna meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Dengan model investasi berbasis hukum administrasi negara, mekanisme pengelolaan Danantara lebih fleksibel dibandingkan skema pembiayaan yang hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dampak positif dari pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) tidak dapat disangkal mencakup berbagai aspek fundamental dalam perekonomian dan hukum keuangan negara. Dari perspektif efisiensi pengelolaan aset negara, Danantara diharapkan mampu melakukan konsolidasi strategis terhadap berbagai aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi. Dengan struktur kelembagaan yang lebih terpadu dan berbasis pada prinsip *good corporate governance* (GCG).  *Holding* ini juga berpotensi mengurangi redundansi birokrasi, yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi pengelolaan keuangan negara. Redundansi birokrasi sering kali mengakibatkan moral *hazard*, di mana terjadi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan investasi.

Menurut Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, yang juga pengurus Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah ini bahwa dalam konteks hukum investasi, Danantara harus beroperasi dengan mengacu pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang menjadi dasar yuridis atas pembentukannya. Prinsip legalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum administrasi negara yang menggarisbawahi bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mega Juwita Saragih Simarmata, Khomsiyah, *Komite Audit, Kualitas Audit dan Audit Tenure dalam Meningkatkan Kekuatan Integritas Laporan Keuangan: Studi Empiris pada Perusahaan BUMN Tahun 2021-2023*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 9 (September 2024).

<sup>3</sup> Rhaysya Admami Habibani, Aldri Frinaldi, dan Roberia, *Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik*, Gudang Jurnal, Vol.2, No.12 (Desember 2024), p.296-303.

**Yudha Aditya Pradana dan Wilma Silalahi**  
*Evaluasi Efektivitas Danantara dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Perekonomian Nasional*

Prinsip legalitas ini mengacu pada perlunya kepastian hukum dalam setiap kebijakan investasi yang diambil, sehingga setiap keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan aset negara tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Dalam praktiknya, legalitas ini juga berkaitan erat dengan prinsip *fiduciary duty*,<sup>5</sup> di mana pengelola investasi negara memiliki tanggung jawab penuh untuk bertindak demi kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.<sup>6</sup>

Selain itu, model pengelolaan investasi yang lebih profesional diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi negara serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan konvensional, seperti utang luar negeri dan instrumen fiskal lainnya.<sup>7</sup> Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah diversifikasi investasi pada sektor-sektor strategis dan berkelanjutan, sehingga Danantara tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keberlanjutan (*sustainability principle*) dalam setiap keputusan investasinya. Dengan demikian, Danantara diharapkan mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan stabilitas fiskal negara. Berbagai negara telah menerapkan model serupa dengan tingkat keberhasilan yang beragam. Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia menjadi contoh konkret bagaimana lembaga pengelola investasi negara dapat memainkan peran strategis dalam mendorong perekonomian nasional. Kedua entitas tersebut berhasil memperkuat ekonomi negara masing-masing melalui strategi investasi jangka panjang yang berbasis pada prinsip keadilan ekonomi dan kedaulatan ekonomi nasional. Dalam konteks Indonesia, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah ingin meniru kesuksesan tersebut dengan tetap berpegang pada asas akuntabilitas hukum,

---

<sup>4</sup> Administrative Law & Governance Journal, *Prinsip Legalitas dalam Administrasi Publik dan Tantangan Implementasinya*, Administrative Law & Governance Journal, Vol.2, No.2 (Juni 2022), p.494.

<sup>5</sup> Wayan Bimanda Panalaga, *Penerapan Asas Fiduciary Duty dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika*, Unes Law Review, Vol.6, No.1 (September 2023).

<sup>6</sup> A. Jalaludin Sayuti, Ria Syafitri dan Tri Silowati, *Pengelolaan Investasi Dana Pensiun pada DAPENSRI PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang*, Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya, Vol.13, No.1 (2015).

<sup>7</sup> Isnurhadi, dkk., *Pendampingan Pengelolaan Investasi pada Pelaku UMKM di Kecamatan Ilir Barat II Palembang*, Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services, Vol.3, No.1 (April 2022), p.1-8.

sehingga setiap bentuk investasi yang dilakukan Danantara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak menimbulkan konflik kepentingan di kemudian hari.

Dengan mempertimbangkan prinsip *due diligence* dalam setiap pengambilan keputusan investasi, Danantara dapat menjadi instrumen yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika perekonomian global. Implementasi prinsip ini akan memungkinkan Danantara untuk menjalankan investasi yang berbasis pada manajemen risiko yang ketat, sehingga potensi kerugian akibat ketidakpastian ekonomi dapat diminimalkan. Dengan demikian, Danantara tidak hanya berfungsi sebagai holding keuangan semata, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan ekonomi yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan finansial negara.

Namun, di samping potensinya, pembentukan Danantara menghadapi berbagai tantangan hukum dan ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan tata kelola (*governance*) yang baik agar Danantara tidak menjadi instrumen yang rentan terhadap *moral hazard* dan penyalahgunaan kewenangan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara menjadi isu krusial yang harus mendapat perhatian serius. Selain itu, terdapat potensi praktik monopoli dalam sektor keuangan yang dapat menghambat kompetisi dan inovasi. Kritik juga muncul terkait kemungkinan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara Danantara dan kementerian teknis yang mengelola BUMN sektoral. Sejumlah ekonom menyoroti bahwa tanpa mekanisme pengawasan berbasis hukum perdata dan administrasi, Danantara bisa menjadi instrumen investasi yang lebih menguntungkan pihak tertentu dibandingkan kepentingan nasional secara luas.

Untuk mengatasi tantangan itu, diperlukan sejumlah langkah yang dapat memperkuat legitimasi hukum dan efektivitas ekonomi Danantara, antara lain:

1. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pilar utama dalam pengelolaan investasi negara. Salah satu cara adalah dengan membentuk mekanisme audit independen yang secara berkala menilai kinerja dan kepatuhan badan ini terhadap prinsip tata kelola keuangan negara.

2. Danantara harus berorientasi tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhitungkan pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekonomi dalam setiap keputusannya.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memastikan Danantara dikelola oleh para profesional dengan keahlian di bidang hukum bisnis dan manajemen risiko.

Dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang ada, pembentukan Danantara sebagai holding BUMN keuangan dapat menjadi langkah progresif dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional berbasis hukum yang kuat. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dalam pidatonya berpendapat bahwa keberhasilan entitas ini sangat bergantung pada sejauh mana prinsip tata kelola hukum dan ekonomi diterapkan, serta bagaimana pemerintah mampu memastikan bahwa investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian nasional yang berkeadilan. Berdasarkan latar belakang di atas, timbul permasalahan di antaranya adalah:

1. Bagaimana efektivitas Danantara dalam mendukung pemerataan ekonomi dan reformasi perekonomian nasional?
2. Bagaimana dampak kebijakan dan program Danantara terhadap sektor-sektor strategis dalam perekonomian nasional?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Danantara dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Perekonomian Nasional**

Model pengelolaan Danantara disebut mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA). Namun, cakupan Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien. BPI Danantara mengelola tujuh BUMN besar di Indonesia yang menguasai berbagai sektor. Yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, Pertamina, Telkom, dan MIND ID. Setidaknya BPI Danantara akan mengelola aset yang diperkirakan senilai 900 juta dolar.

BPI Danantara akan menggantikan peran Kementerian BUMN. Namun Kementerian BUMN tetap ada. Kementerian BUMN nantinya akan menjadi regulator BUMN yang mempunyai hak. Yakni menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengusulkan agenda RUPS. Kemudian meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan. Serta menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang akuntansi dan keuangan, pengembangan dan investasi, operasional dan pengadaan barang dan/jasa. Sedangkan BPI Danantara akan berperan sebagai eksekutor BUMN. Yakni bertugas melakukan pengelolaan BUMN, mengelola dividen holding investasi, holding operasional, dan BUMN, menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.

Dalam persetujuan restrukturisasi BUMN.<sup>8</sup> Termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN. Serta mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR atas rencana kerja dan anggaran perusahaan holding investasi dan holding operasional.<sup>9</sup> Kehadiran Danantara membuat dividen dari BUMN langsung dialokasikan Danantara untuk investasi. Laba dari investasi yang dikelola Danantara dari dividen BUMN nantinya akan dijadikan sumber dana untuk membiayai berbagai program pemerintah.<sup>10</sup>

Efektivitas Danantara sebagai platform digitalisasi aset negara dalam mendukung pemerataan ekonomi dan reformasi perekonomian nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, baik struktural maupun fungsional.<sup>11</sup> Danantara, sebagai inisiatif strategis pemerintah, bertujuan mentransformasi cara pengelolaan aset negara yang selama ini bersifat konvensional menjadi lebih modern,

---

<sup>8</sup> Ismail Koto, *Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, SiNTESa CERED, Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke-1, (2022).

<sup>9</sup> M. Iqbal Asnawi, *Implikasi Pengelolaan Bumn Persero dalam Kerangka welfare State berdasarkan Mekanisme perseroan Terbatas*, Jurnal Samudera Keadilan, Vol.2, No.1 (Januari-Juni 2016).

<sup>10</sup> Willa Wahyuni, *Mengenal Danantara dan Aspek Hukumnya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-danantara-dan-dasar-hukumnya-lt67b5de78c441a/?page=2>, diakses pada 17 April 2025.

<sup>11</sup> Esther Sri Astuti, *Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa*, Institute for Development of Economics and Finance, diakses dari <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2025/02/Esther-Sri-Astuti-DANANTARA.pdf>, diakses pada 17 April 2025.

**Yudha Aditya Pradana dan Wilma Silalahi**  
*Evaluasi Efektivitas Danantara dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Perekonomian Nasional*

transparan, dan produktif melalui pendekatan digital. Hal ini dilakukan dengan menjadikan aset-aset negara tidak hanya sebagai barang pasif, tetapi sebagai instrumen aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks pemerataan ekonomi, Danantara berperan penting dalam membuka akses ekonomi yang lebih luas, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui digitalisasi dan pemanfaatan data aset yang terintegrasi, program ini memungkinkan pelaku usaha di daerah untuk memanfaatkan aset-aset negara yang sebelumnya tidak dikelola secara optimal. Dengan demikian, terjadi peningkatan pemerataan pemanfaatan aset dan distribusi ekonomi tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menyebar ke daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh oleh pembangunan.

Lebih jauh lagi, dari sisi reformasi perekonomian nasional<sup>12</sup>, Danantara memberikan kontribusi strategis dalam menciptakan sistem pengelolaan kekayaan negara yang lebih transparan dan efisien. Digitalisasi memungkinkan pemantauan dan evaluasi aset secara real-time, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas dan daya guna aset negara. Hal ini menjadi bagian penting dari upaya reformasi struktural dalam sistem perekonomian nasional yang selama ini menghadapi tantangan berupa inefisiensi, tumpang tindih aset, dan kurangnya data yang terintegrasi.

Salah satu hal yang menonjol dari Danantara adalah adanya ketentuan “kebal hukum” bagi pejabatnya. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, pejabat Danantara tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas kerugian jika mereka:

- a. Tidak melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan.
- b. Mengelola investasi dengan iktikad baik dan kehati-hatian.<sup>13</sup>
- c. Tidak memiliki benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.
- d. Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

---

<sup>12</sup> W. Fitri dan Elvianti, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No.3 (2021), p.598-611.

<sup>13</sup> R. A. Yuannisa, R. Nasution dan I. Harahap, *Peran Pasar Modal Syariah dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.8, No.2 (2023), p.1117.

Efektivitas program Danantara juga tercermin dalam kemampuannya mendorong kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun dengan pelaku swasta dan investor. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat nilai aset, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama yang saling menguntungkan. Sektor-sektor strategis seperti energi, pertanian, logistik, dan teknologi informasi mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan ini karena adanya optimalisasi aset yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional.<sup>14</sup>

Meskipun demikian, efektivitas Danantara masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia, terutama di daerah. Selain itu, aspek regulasi dan koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penentu yang memengaruhi kelancaran implementasi program. Tanpa dukungan regulasi yang adaptif dan birokrasi yang efisien, potensi besar Danantara bisa tidak tercapai secara maksimal.

Secara keseluruhan, Danantara merupakan langkah progresif yang memiliki efektivitas tinggi dalam mendorong pemerataan ekonomi dan reformasi struktural perekonomian nasional. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, kebijakan pendukung yang kuat, serta komitmen bersama untuk menjadikan aset negara sebagai fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## **2. Dampak Kebijakan dan Program Danantara terhadap Sektor-Sektor Strategis dalam Perekonomian Nasional**

Kebijakan dan program Danantara sebagai inisiatif strategis pemerintah dalam digitalisasi dan optimalisasi aset negara telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor strategis dalam perekonomian nasional. Konsep dasar dari Danantara adalah bagaimana aset negara yang selama ini kurang produktif dapat diberdayakan secara lebih efisien dan transparan melalui pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini tidak hanya mendukung pengelolaan aset yang lebih modern, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

---

<sup>14</sup> J. Wirawan, *Motif, Dampak, dan Pengungkapan Derivatif Keuangan: Wawasan dari Tinjauan Literatur*, Jurnal Inovasi Akuntansi dan Keuangan, Vol.6, No.3 (September 2024).

Salah satu dampak utama kebijakan Danantara terlihat dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan mengintegrasikan data aset negara ke dalam sistem digital yang terbuka dan terstruktur, UMKM memiliki akses yang lebih baik terhadap aset-aset produktif, seperti lahan, bangunan, atau fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku ekonomi kecil yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan dukungan dari negara dalam bentuk aset produktif. Selain memberikan dorongan terhadap skala usaha UMKM<sup>15</sup>, hal ini juga menciptakan efek domino berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.

Dalam sektor infrastruktur dan logistik, Danantara juga memberikan kontribusi besar. Melalui digitalisasi aset negara, pemerintah dapat dengan lebih mudah memetakan dan mengelola aset-aset strategis yang berhubungan dengan konektivitas nasional seperti, pelabuhan, jalan, dan gudang. Efisiensi pengelolaan aset ini berdampak langsung pada peningkatan efektivitas distribusi barang dan jasa, serta menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu penghambat daya saing ekonomi nasional. Di sisi lain, sektor energi dan sumber daya alam juga terdampak positif, karena dengan pemetaan digital aset, proyek-proyek pembangunan energi berbasis aset negara dapat dijalankan lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, sektor keuangan dan investasi publik juga terdorong oleh adanya program Danantara. Dengan pengelolaan aset negara yang lebih terbuka dan sistematis, nilai aset dapat diketahui secara jelas dan akurat, sehingga menjadi jaminan atau basis untuk skema pembiayaan yang lebih inovatif. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menarik investor swasta dalam skema kerja sama pemanfaatan aset tanpa harus menjual aset negara. Konsep ini memperkuat keuangan negara, meningkatkan nilai tambah aset, serta menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan dan minim risiko.

---

<sup>15</sup> N. Saputri, Y. Yuliani, & Y. Putri, *Peningkatan Kemampuan UMKM dalam Melakukan Analisis Kelayakan Usaha Agar dapat Bertahan di Masa Pandemi COVID-19*, Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services, Vol.2, No.2 (November 2021), p.177-181.

Dari perspektif kebijakan makroekonomi, Danantara turut berperan dalam menciptakan fondasi bagi reformasi struktural ekonomi. Dengan menciptakan sistem pengelolaan aset yang berbasis data dan teknologi, kebijakan ini memberikan arah baru dalam perumusan kebijakan fiskal dan pembangunan nasional berbasis potensi nyata kekayaan negara. Hal ini membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan Danantara masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama terletak pada konsolidasi data aset lintas kementerian dan lembaga, yang selama ini tersebar dan belum sepenuhnya terintegrasi. Selain itu, kesenjangan infrastruktur digital di beberapa wilayah, terutama daerah tertinggal dan terpencil, turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program ini. Rendahnya literasi digital dan kesadaran masyarakat serta aparatur daerah mengenai manfaat program ini juga menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui pelatihan dan sosialisasi yang masif.

Secara keseluruhan, kebijakan dan program Danantara memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor-sektor strategis dalam perekonomian nasional, baik dalam hal efisiensi pengelolaan aset, peningkatan produktivitas sektor riil, maupun penciptaan nilai tambah ekonomi. Dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta koordinasi lintas sektor yang lebih baik, Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen utama dalam mendorong transformasi ekonomi nasional menuju arah yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Danantara diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional yang berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan reformasi perekonomian. Berikut adalah manfaat Danantara, antara lain:

- a. Meningkatkan investasi: Danantara dapat meningkatkan investasi nasional dan mengurangi ketergantungan BUMN pada APBN dan utang konvensional.
- b. Memperluas ekspor: Danantara dapat memperluas akses produk-produk lokal ke pasar internasional dan meningkatkan devisa negara.

**Yudha Aditya Pradana dan Wilma Silalahi**  
*Evaluasi Efektivitas Danantara dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Perekonomian Nasional*

- c. Menciptakan lapangan kerja: Danantara dapat membuka peluang kerja baru, terutama di sektor manufaktur, teknologi, dan energi terbarukan.
- d. Menurunkan kesenjangan ekonomi: Danantara dapat membantu menurunkan kesenjangan ekonomi dan wilayah.
- e. Meningkatkan daya saing ekonomi: Danantara dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Tantangan Danantara, antara lain:

- a. Keberhasilan Danantara bergantung pada sistem dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah.
- b. Danantara harus berorientasi tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhitungkan pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekonomi.
- c. Danantara harus dikelola oleh para profesional dengan keahlian di bidang hukum bisnis dan manajemen risiko.

Strategi Danantara, antara lain:

- a. Mengadopsi praktik terbaik dari berbagai negara.
- b. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
- c. Membentuk mekanisme audit independen.
- d. Melakukan pengawasan yang ketat.
- e. Memformulasikan kebijakan yang adaptif.

### **C. PENUTUP**

Danantara menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan dalam mendukung pemerataan ekonomi melalui digitalisasi aset negara dan optimalisasi kekayaan negara. Dengan memanfaatkan teknologi dan skema kerja sama yang inklusif, Danantara berhasil membuka akses ekonomi yang lebih luas, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor informal. Selain itu, perannya dalam mendukung reformasi perekonomian nasional tercermin dari kontribusinya dalam mendorong efisiensi, transparansi, serta pengelolaan aset negara yang lebih produktif dan berkelanjutan. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi, literasi digital, dan kolaborasi antarlembaga, Danantara memiliki potensi besar sebagai katalis transformasi ekonomi nasional ke arah yang lebih merata dan berkeadilan.

Kebijakan dan program Danantara memberikan dampak positif terhadap sektor-sektor strategis dalam perekonomian nasional, terutama melalui pemanfaatan aset negara secara digital dan optimal. Inisiatif ini mendorong efisiensi, meningkatkan nilai tambah aset, serta membuka peluang investasi baru di sektor energi, infrastruktur, dan UMKM. Dengan pendekatan teknologi dan kolaboratif, Danantara berperan sebagai katalis transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan jangka panjang memerlukan dukungan regulasi yang adaptif dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Untuk meningkatkan efektivitas Danantara dalam mendukung pemerataan ekonomi dan reformasi perekonomian nasional, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital bagi masyarakat, serta sinergi yang lebih solid antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap implementasi program agar dapat menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan ekonomi nasional dan memperluas dampak positif secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah perlu memperluas cakupan dan integrasi program Danantara dengan sektor-sektor strategis lainnya melalui kebijakan lintas sektor yang terkoordinasi. Diperlukan pula peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi yang berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi yang ketat agar kebijakan Danantara dapat memberikan dampak yang lebih optimal, merata, dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Astuti, Esther Sri. Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa. Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance. diakses dari <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2025/02/Esther-Sri-Astuti-DANANTARA.pdf>. diakses pada 17 April 2025.

### Publikasi

Administrative Law & Governance Journal. *Prinsip Legalitas dalam Administrasi Publik dan Tantangan Implementasinya*. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol.2. No.2 (Juni 2022).

Asnawi, M. Iqbal. *Implikasi Pengelolaan BUMN Persero dalam Kerangka Welfare State berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas*. *Jurnal Samudera Keadilan*. Vol.2. No.1 (Januari-Juni 2016).

Fitri, W., dan Elvianti. *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol.9. No.3 (2021).

Habibani, Rhaysya Admami, Aldri Frinaldi dan Roberia. *Penerapan Prinsip Legalitas dalam Kebijakan Administrasi Publik*. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol.2. No.12 (Desember 2024).

Isnurhadi, dkk., *Pendampingan Pengelolaan Investasi pada Pelaku UMKM di Kecamatan Ilir Barat II Palembang*. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*. Vol.3. No.1 (April 2022).

Koto, Ismail. *Peran Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. SiNTESa CERED. Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke-1, 2022.

Panalaga, Wayan Bimanda. *Penerapan Asas Fiduciary Duty dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika*. *Unes Law Review*. Vol.6. No.1 (September 2023).

Saputri, N., Y. Yuliani dan Y. Putri. *Peningkatan Kemampuan UMKM dalam Melakukan Analisis Kelayakan Usaha Agar dapat Bertahan di Masa Pandemi COVID-19*. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*. Vol.2. No.2 (November 2021).

Sayuti, A Jalaludin, Ria Syafitri, Tri Silowati. *Pengelolaan Investasi Dana Pensiun pada DAPENSRI PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang*. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*. Vol.13. No.1 (2015).

Simarmata, Mega Juwita Saragih dan Khomsiyah. *Komite Audit, Kualitas Audit dan Audit Tenure dalam Meningkatkan Kekuatan Integritas Laporan Keuangan: Studi Empiris pada Perusahaan BUMN Tahun 2021-2023*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.5. No.9 (September 2024).

Wirawan, J.. *Motif, Dampak, dan Pengungkapan Derivatif Keuangan: Wawasan dari Tinjauan Literatur*. *Jurnal Inovasi Akuntansi Dan Keuangan*. Vol.6. No.3 (September 2024).

Yuannisa, R. A., R. Nasution, & I. Harahap. *Peran Pasar Modal Syariah dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. Vol.8. No.2 (2023).

#### **Website**

Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain. *DANANTARA: Reformasi Investasi Strategis dalam Hukum dan Ekonomi*, diakses dari <https://syariah.uinsaid.ac.id/danantara-reformasi-investasi-strategis-dalam-hukum-dan-ekonomi/>. diakses pada 16 April 2025.

Wahyuni, Willa. *Mengenal Danantara dan Aspek Hukumnya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-danantara-dan-dasar-hukumnya-lt67b5de78c441a/?page=2>. diakses pada 17 April 2025.

#### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.